

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Konsep**

##### **2.1.1. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik ini termasuk dalam bahasan ilmu administrasi. Bidang kajian kebijakan publik sangat penting bagi administrasi negara, karena selain kebijakan itu menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, kebijakan dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang didalamnya terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan tidak terlepas dari peran dan fungsi pemerintah. Kebijakan publik sering kita dengar dan dipergunakan sebagai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang didalamnya mencakup peran pemerintah atau dapat diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.

Menurut Nurcholis (dalam Tahir, 2014:24) kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal

pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Pasolong (2014:38) kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, Berdasarkan pendapat para ahli diatas kebijakan merupakan organisasi sebagai langkah alternatif untuk mengambil suatu kebijakan.

Beberapa pendapat lain mengenai definisi kebijakan yakni, menurut James Anderson (dalam Agustino, 2014:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, *Public Policy Making* sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Dan hal ini yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Berdasarkan Kraft dan Furlong (dalam Nugroho, 2015:105) “kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain”. Menurut Anggara (2014:33) kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas publik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui

suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Dapat dipahami bahwa kebijakan dibuat tidak dalam keadaan vakum.

Menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2015:9), menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya menurut Said Zainudin Abidin (dalam Anggara, 2014:37) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Dapat dipahami bahwa kebijakan menurut dua pendapat ahli diatas tersebut yaitu Carl Friedrich dan Said Zainudin Abidin bahwa suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai solusi dalam mengatasi berbagai macam masalah publik. permasalahan yang penulis paparkan diatas bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi kalimantan barat dalam masalah kurang berhasilnya proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ditunjukkan dengan kurangnya armada pengangkutan sampah serta kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah terkait pengelolaan sampah.

## 2.2. Teori

### 2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2014:232), bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016:134), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan, pertama badan-badan pelaksana yang ditugaskan oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang

dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personel, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan diatas semuanya uang. Kedua, badan –badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret regulasi serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, maupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut Huntington (dalam Mulyadi, 2015:24) perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk dan ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu. Dalam permasalahan ini implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum optimal dilaksanakan dilihat dari beberapa

permasalahan seperti kurangnya petugas, sumber daya manusia dan terkait sanksi masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara, 2014:257) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu “karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of the statute of structure implementation*), lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*)”. Sedangkan menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian ini adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang sehingga masyarakat banyak yang tidak tau atau tidak paham tentang pengelolaan sampah.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya dalam penelitian ini masih kurang seperti armada pengangkutan sampah dan sumber daya manusia.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *standard operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Charles O. Jones (dalam Widodo, 2018:86), merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Hal tersebut memerlukan dua tahap tindakan yaitu: 1) Merumuskan tindakan yang akan dilakukan, 2) Melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan tadi. Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2018:89), bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan publik terdapat dalam tiga macam variabel, yaitu:

1. Tahap pengorganisasian (*to organization*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentu lembaga

organisasi) mana yang melaksanakannya, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sasaran apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen pelaksana kebijakan (dalam Widodo, 2018:91)

Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2018:91) ada beberapa bagian dalam organisasi ini, yaitu:

a. Pelaksana kebijakan (*Policy implementor*)

Pelaksana kebijakan (*policy implementor*) sangat tergantung pada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, Badan, kantor, Unit Pelaksana (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sektor swasta (*private sectors*)
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4. Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekadar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangannn, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

b. Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan



dan dilakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP juga dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan ketika menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur buku berupa Standar Prosedur Operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kegiatan dan standard prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan beberapa besarnya anggaran dan darimana sumbernya, serta peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan.

Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat dan lain-lain.

Demikian pula macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegial atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

e. Penetapan jadwal kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya bisa berjalan atau terlaksana jika ada yang menjalankan dan melaksanakannya, untuk itu diperlukan organisasi karena

tujuan awal dari organisasi adalah merealisasikan program-program yang telah dirancang, penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak pada proses kebijakan. Yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada tingkatan khusus perkembangan badan atau instansi. Cara organisasi memberikan perlindungan pada dirinya adalah mempengaruhi hal-hal berikut yaitu: penerapan kebijakan, partisipasi pelaku lain diluar badan, penafsiran kebijakan oleh para birokrat instansi atau badan yang memiliki permasalahan dengan arah yang ingin dituju program.

Pada tahap pengorganisasian dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan pemangkat harus memiliki SOP agar mereka mengetahui bagaimana tata cara membuang sampah yang baik dan benar. Namun berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak membuang sampah sesuai SOP yang telah dibuat sehingga sampah menjadi bercampur baur dengan berbagai jenis sampah. Selain itu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat yaitu kurangnya sumber daya dan tenaga dalam bidang penanganan kebersihan dan tenaga operasional untuk pengangkutan sampah yang menyebabkan proses pengelolaan sampah belum dapat berjalan dengan baik sehingga masih terdapat tumpukan sampah di beberapa TPS. Pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat memiliki jumlah armada yang terbatas seperti truk sampah yang hanya memiliki 2 buah dan dan arm roll 1 buah. Terbatasnya jumlah truk sampah dan arm roll di Kecamatan Pemangkat ini tidak sesuai dengan luasnya jangkauan wilayah Kecamatan pemangkat sekitar 111,00 km<sup>2</sup> yang didalamnya terdapat 8 Desa yaitu Desa

Perapakan, Desa Jelutung, Desa Harapan, Desa Penjajap, Desa Pemangkat Kota, Desa Sebatuan, Desa Gugah Sejahtera dan Desa Lonam dan volume sampah yang setiap hari semakin bertambah yaitu kurang lebih 15 ton per hari yang diperkirakan dimuat dengan 7 truk sampah. Sedangkan truk sampah yang ada hanya berjumlah 2 buah sehingga proses pengangkutan dilakukan secara berulang-ulang setiap hari, belum lagi mengangkut di Kecamatan lain yang meliputi Kecamatan Tebas, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Salatiga dan Kecamatan Selakau. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah sehari-hari.

## 2. Tahap Interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis dan operasional (dalam Widodo, 2018:90). Interpretasi adalah penafsiran oleh para pelaksana agar kebijakan menjadi jelas dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan. Interpretasi memuat rencana yang matang. Dukungan dana yang memadai dan sesuai dengan tujuan perumus kebijakan. Pada aspek interpretasi meliputi beberapa hal yaitu:

### a. Isi dan tujuan dipahami

Memahami isi dan tujuan dari sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksananya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan tujuan ini harus dilaksanakan oleh para implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

b. Sosialisasi

Maksud dari sosialisasi adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan berkala, agar masyarakat mengetahui kebijakan yang telah dibuat dan apa dampaknya kepada masyarakat.

c. Dukungan masyarakat

Dukungan dari masyarakat adalah baiknya tanggapan atau respon yang disampaikan oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan, sehingga membuat mereka merasa mau turun ambil bagian untuk mensukseskan kebijakan tersebut.

Aktivitas interpretasi kebijakan ini tidak hanya sekedar menjalankan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih operasional, tetapi dilanjutkan juga dengan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham, tetapi lebih penting mereka menerima dan mendukung kebijakan ini. Kebijakan dapat berjalan dengan baik jika sudah ada pemahaman yang sama terutama pihak pelaksana dan pihak masyarakat. Namun berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan pemangkat, pihak UPTD Persampahan dan Kecamatan Pemangkat tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami dan mengetahui isi dan tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah. Perlunya sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah ini agar bisa

mengubah pola pikir masyarakat dalam menjaga kebersihan dan juga dalam pengelolaan sampah yang berasal dari lingkungan rumah tangga, sehingga masyarakat yang kurang sadar dan paham menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya menjadi tahu bagaimana pentingnya dalam menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar

Dalam hal ini permasalahan yang peneliti temukan adalah masih kurang maksimalnya sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan jadwal pembuangan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### 3. Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya (dalam Widodo, 2018:89).

Tahap aplikasi ini berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu sebuah proses dinamis karena berhubungan dengan kebijakan-kebijakan lain dalam manusia yang mana seseorang mencoba melakukan pekerjaan penyesuaian dalam organisasi maupun penafsiran. Penerapan program tidaklah terlalu luar biasa suatu penafsiran politis yang berwenang mungkin tidak akan dipraktekkan di lapangan dan sebaliknya. Penerapan seringkali sebagai suatu proses dinamis dimana para pelaksananya atau petugas diarahkan oleh pedoman

kebijakan yang menjadi patokan maupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Menerapkan kebijakan pengelolaan sampah merupakan tahapan aplikasi dalam penerapan suatu kebijakan yang dimana proses implementasi tersebut dapat ditetapkan kedalam realita yang nyata.

Tahap aplikasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas perlu adanya penerapan sanksi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Namun berdasarkan observasi peneliti, ditemukan sebagian besar masyarakat membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat karena sering sekali terlihat beberapa masyarakat yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya. Bahkan tempat sampah yang sudah tersedia seolah-olah tidak ada dan malah membuang sampah tersebut sembarangan. Namun, ada di beberapa tempat pemerintah memang kurang menyediakan tempat sampah. Membuang sampah sembarangan sering dilakukan baik di kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan kalangan orang tua.

Selain itu ditemukan juga masih banyak masyarakat yang membuang sampah diluar jadwal yang telah ditentukan seperti membuang sampah pada siang hari. Seharusnya jadwal pembuangan sampah pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 13 dan 14.

Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti akan berusaha untuk menggambarkan permasalahan dalam implementasi pengelolaan sampah di

Kecamatan Pemangkat. Masalah ini akan peneliti analisis melalui tiga aktivitas penting yang telah diuraikan oleh Charles O. Jones yaitu: tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi. Peneliti menilai bahwa teori yang diuraikan oleh Jones sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Ketiga variabel ini dirasa mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

### **2.3. Hasil Penelitian yang Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang substansi pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai rujukan pembandingan, supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini dapat relevan. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Olanda 2021 (skripsi) yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edward III yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengangkat permasalahan sampah, selain itu metode penelitian yang peneliti lakukan juga sama yaitu sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Edward III sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori Charles O. Jones. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

2. Penelitian relevan selanjutnya oleh Risma Afsyahrina 2021 (Skripsi) dengan judul Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Kecamatan Sintang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di Kecamatan Sintang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan rapi di sekitar tempat penampungan sementara (TPS). Metode penelitian yang digunakan oleh Risma Afsyahrina adalah metode penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui keadaan atau status tertentu dan berusaha menggambarkan fenomena sosial tertentu.

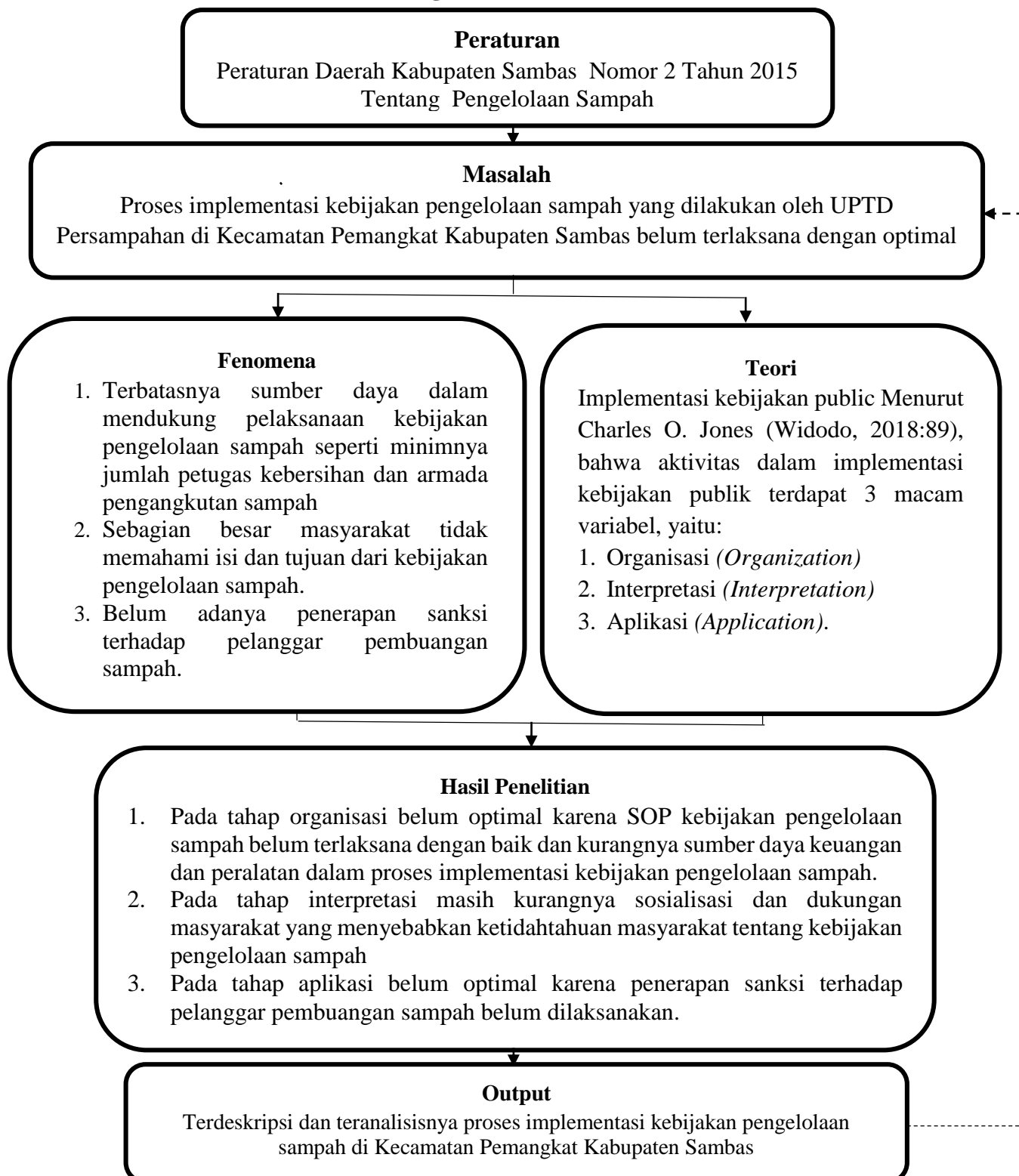
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas isu persampahan. Metode yang digunakan dalam penelitian sama sama menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik

pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajian dan serta teori yang digunakan. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Sintang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kajian dalam penelitian ini adalah kajian manajemen publik sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah kajian kebijakan publik. Teori yang digunakan adalah teori Notoatmodjo sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah teori Charles O. Jones yang terdapat dalam tiga variabel yaitu tahap pengorganisasian, tahap interpretasi dan tahap aplikasi.

#### **2.4. Alur Pikir Penelitian**

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan melihat langsung kondisi di lapangan sebagai bahan penelitian. Oleh sebab itu dibutuhkan pemikiran yang mendalam agar dapat menemukan solusi dalam masalah sampah di Kecamatan Pemangkat. Bentuk implementasi yang diambil yaitu implementasi menurut Charles O. Jones yang didalamnya terdapat beberapa kriteria seperti organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2022

## **2.5. Asumsi/Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian yang ingin peneliti ungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana organisasi yang terdapat di UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah?
2. Bagaimana interpretasi yang telah dilakukan oleh UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh UPTD Persampahan di Kecamatan Pemangkat dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah?